

**ANALISIS PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN PADA ANAK-ANAK  
PETANI KELAPA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Yusmalena, Zahirman, Ahmad Eddison  
Mahasiswa Program Studi Pkn Universitas Riau  
Dosen program Studi Pkn Universitas Riau  
[Lenabee37@yahoo.co.id](mailto:Lenabee37@yahoo.co.id) 085355495679

**Abstrak**

This research on the background of lack of awareness of parents in their children's education, especially compulsory education, parents consider education in school yet and can not guarantee their children's lives in the future. Summary of the research problem "What is Compulsory Education Implementation 9 Years Of Delivering On Coconut Farmers Children In the Rantau Panjang Village Enok sub-district Indragiri Hilir District ". Purpose To Know What The implementation done a Compulsory Education 9 Years Of Delivering On Coconut Farmers Children In the Rantau Panjang village Enok sub-district Indragiri Hilir District. Hypothesis put forward is "Implementation of Compulsory Education 9 Years Less Implemented In Coconut Farmers Children In In the Rantau Panjang village Enok sub-district Indragiri Hilir District ". Qualitative descriptive study carried out in October-March 2013 Population and sample in this study is 532 KK, using sampling techniques or sample Aimed Purposive sampling of 32 people. Data collection instrument in this study purports A survey of 16 of 16 questions and interview questions. The formula:  
 $P = F / N \times 100\%$  (Sudjono, 2003: 40).

Results of this study show that implementation of the Compulsory Education 9 Years In Coconut Farmers Children In the Rantau Panjang village Enok sub-district Indragiri Hilir District. Already Implemented. with the percentage of 75% is located in the Rank of 66.67% - 100% (AIP). while the hypothesis of this study rejected

**Keywords : Implementation of the Compulsory Education 9 Years, In Coconut Farmers Children, In the Rantau Panjang.**

**PENDAHULUAN**

Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia (dalam hal ini masyarakat petani) dapat hidup berkembang sejalan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup, salah satu fungsi sosial, sebagai bimbingan, dan sebagai sarana pertumbuhan yang mempersiapkan diri membentuk disiplin hidup.

Dalam memajukan pendidikan nasional, diharapkan anak-anak dapat untuk menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun, hal ini tentunya untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan kesempatan yang ada..

Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan, yaitu dengan pencanangan program wajib belajar sembilan tahun yakni Sekolah Dasar ( SD ) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan " melek "huruf dan masyarakat belajar. Program wajib belajar sembilan tahun dianggap sebagai langkah yang strategis karena program ini merupakan awal bahwa manusia ditempatkan sebagai faktor terpenting untuk pengembangan kehidupan bangsa.

Pendidikan yang dimiliki seseorang mencerminkan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula kemampuan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi atau nilai-nilai baru.

Program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah merupakan kelanjutan dari program-program pendidikan sebelumnya. Program pendidikan dengan penekanan pada peningkatan sumber daya manusia sebenarnya telah dimulai tahun 1983 dengan pencanangan wajib belajar enam tahun, yakni untuk usia 7 – 15 tahun secara nasional. Suksesnya Program tersebut akhirnya memotivasi pemerintah untuk melanjutkan program wajib belajar menjadi Sembilan tahun sejak tahun 1994 yang lalu. Program tersebut sekaligus untuk menjawab dinamika perkembangan zaman yang terus berkembang.

Walaupun sistem pendidikan nasional telah diatur sedemikian rupa, namun belum menjamin bahwa pendidikan Indonesia telah maju, hal ini dapat dilihat dari kondisi pendidikan anak-anak yang orang tuanya petani kelapa yang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah bahkan tidak pernah mengecap pendidikan sama sekali, seperti yang terdapat dalam pendidikan anak-anak petani kelapa yang ada di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dimana anak-anak tersebut pada umumnya masih ada yang tidak menamatkan pendidikan di SD maupun SMP.

Fenomena di lokasi penelitian, menunjukkan Sebagian besar dari mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan di sekolah belum atau tidak mampu menjamin kehidupan anak mereka yang akan datang. Dilain pihak berpendapat bahwa pendidikan tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk mempertahankan tradisi bertani yang mereka jalani. Pandangan terakhir selalu beranggapan bahwa informasi tentang pendidikan sangat mahal harganya, sehingga masyarakat yang kehidupan sehari-harinya bertani sulit untuk mencapainya.

Dengan demikian, masalah ini tentunya dapat menimbulkan pengaruh kepada anak-anak petani kelapa, yang mana dari fenomena yang terjadi anak-anak tersebut masih ada yang tidak menamatkan pendidikan baik itu di SD maupun SMP. Hal ini merupakan masalah yang masih akan terus terjadi sepanjang pemikiran seperti ini menjadi halangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Untuk itu penulis merasa sangat tertarik untuk menggali masalah ini lebih dalam.

Seiring dengan perkembangan di dalam segala aspek kehidupan, pendidikan tidak hanya di jadikan sebagai wahana untuk belajar membaca dan menulis, tetapi lebih dari itu pendidikan sudah menjadi tolak ukur kapabilitas seseorang baik status sosial, pekerjaan bahkan di pemerintahan. Sebagai masyarakat petani tenaga kerja sangat penting, anak-anak juga merupakan tenaga kerja bagi keluarga yang bersangkutan. Tradisi bertani, berladang, dan bercocok tanam lainnya melahirkan suatu kebiasaan menggunakan anak istri sebagai tenaga kerja murah.

Dengan demikian, akhirnya anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah. Perkembangan berikutnya memang mereka mengerti tentang perkembangan zaman. Akan tetapi, mereka masih tetap beranggapan bahwa asal anak-anak mereka sudah bisa membaca dan menulis masalah sekolah sudah cukup dan tidak perlu melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Bahkan anak perempuan akan lebih parah lagi keadaanya, mereka tidak mendapatkan kesempatan seluas anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan disekolahkan tidak ada manfaatnya sebab biarpun bersekolah tinggi akhirnya akan kembali juga, yaitu tugasnya sebagai istri yang harus di dapur dan beranak tidak mengherankan kalau di daerah dipedesaan yang sebenarnya masih dalam usia sekolah terpaksa harus dinikahkan. Ditambah lagi adanya alasan bahwa tanggung jawab keluarga adalah laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga, sementara pihak perempuan hanya mengikuti saja. di dukung juga dengan jarak tempuh ke sekolah cukup jauh apalagi yang berada dipinggiran sungai atau dusun dusun yang ada di desa tersebut. mereka harus

menggunakan pompong atau perahu untuk pergi ketempat tujuan (sekolah) tentunya hal ini juga dapat menjadi kendala bagi anak-anak petani kelapa dan para orang tua.

Pada umumnya orangtua petani kelapa dalam memandang pentingnya pendidikan bagi anaknya masih sangat rendah, sehingga mereka tidak memperdulikan anak-anak mereka mau sekolah atau tidak. Fenomena lain yang berkembang di masyarakat bahwa rendahnya partisipasi sekolah disebabkan oleh pengaruh lingkungan, dimana anak-anak lebih suka pergi ikut orangtua ke kebun untuk membantu orangtuanya bekerja, di samping itu pula bahwa lingkungan alam lebih menarik perhatian mereka daripada untuk pergi ke sekolah.

Kondisi nyata yang penulis hadapi dalam masyarakat desa rantau panjang umumnya para orang tua setiap harinya bertani/berkebun,bertukang,mencari ikan dll. Namun kebanyakan pekerjaan orang tua di desa ini bekerja di kebun terutama kebun kelapa, setiap orang tua petani kelapa yang pergi bekerja terkadang ada yang sampai berminggu-minggu dan ada juga yang pergi pagi pulang sore,tidak banyak waktu mereka untuk berkumpul dan bercerita kepada keluarga, para tetangga atau pun masyarakat disekitarnya terutama bagi orang tua petani kelapa yang pergi dengan waktu yang cukup lama, sedangkan anak-anak mereka yang tidak bersekolah lagi lebih memilih untuk bekerja membantu orang tua dikebun, mencari ikan, menyamat atap (membuat anyaman atap daun) atau pun pekerjaan yang lain yang masih bisa dikerjakannya.

Oleh sebab itu pada kejadian seperti ini orang tua,guru,dinas pendidikan atau instansi yang terkait didalamnya, hendaknya memberikan peranya dan memberikan pengaruh tentang pentingnya pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Berdasarkan fenomena permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menagangkat judul **“Analisis Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-anak Petani Kelapa Di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir”**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Apakah Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Sudah Terlaksana Pada Anak-anak petani Kelapa Di desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir ? Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Apakah Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Sudah Terlaksana Pada Anak-anak petani Kelapa Di desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini pada dasarnya bermanfaat untuk memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan pada umumnya, dan disamping itu mempunyai nilai praktis antara lain :

1. Bagi penulis, utuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan memperluas cakrawala berfikir bagi penulis.
2. Bagi Dinas Pendidikan, hasil yang di peroleh melalui penilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal pelakasanaan wajib belajar 9 tahun.
3. Sebagai sumber dan bahan informasi bagi instansi terkait dan masyarakat pada umumnya khususnya orangtua petani kelapa yang berada Di desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.

### **Undang-Undang Wajib Belajar**

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31 selanjutnya Undang-undang wajib belajar tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII tentang wajib belajar pasal 34 ayat 1,2,3 dan 4 yang berbunyi :

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional )
- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, pasal 9 ayat 1,2,3,dan 4 yang berbunyi :
- 1 Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
  - 2 Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
  - 3 Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
  - 4 Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang terjadi dilapangan, maka penulis merumuskan Hipotesis sebagai berikut : **“Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Kurang Terlaksana Pada Anak-anak Petani Kelapa di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir”**

Hipotesis diatas juga sejalan dengan pendapat Soelaiman Joesef yang mengatakan “Sekolah sebagai Station In life” sebab jika seseorang putus sekolah disitu sudah menunggu nasibnya. Namun keadaan tersebut sudah banyak ditinggalkan orang, karena mereka beranggapan bahwa belajar disekolah bukan satu-satunya faktor yang menentukan corak kehidupan seseorang ( Soelaiman Joesef, 1979 :16 ).

Jadi berdasarkan hipotesis yang peneliti ajukan diatas sejalan dengan pendapat Soelaiman Joesef yang kesimpulannya Wajib Belajar 9 Tahun dapat Kurang Terlaksana karena sekolah bukan satu-satunya jalan untuk menentukan corak hidup.

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Maret 2013.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah: Seluruh masyarakat Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 532 KK. Dengan jumlah penduduk sebagai berikut

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	1114
2.	Perempuan	1111
<i>Sumber : kantor kepala desa rantau panjang 2012</i>		Total : 2225 orang

Dalam mengambil sampel didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Sample atau Sampel bertujuan. Menurut Suharsimi Arikunto *Purposive Sampling* adalah dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil yang besar dan jauh.

Syarat-syarat pengambilan sampel bertujuan atau *purposive sample* sebagai berikut :

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi ( key subjects).

- c. penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan. ( Suharsimi Arikunto : 1992 :113 ).

Berdasarkan pendapat diatas, karena keterbatasan waktu dan dana maka yang penulis jadikan sampel tersebut diambil berdasarkan pertimbangan penulis bahwa populasi yaitu orang tua petani kelapa yang memiliki anak usia wajib belajar dan mempunyai waktu luang seperti pergi pagi pulang sore dan memiliki kecendrungan karakteristik yang sama, sehingga sampel yang diambil bisa mewakili populasi, dan mampu memberikan keterangan/informasi tentang Analisis Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-anak Petani Kelapa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah keseluruhan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 orang

Bentuk penelitian ini adalah Diskriptif Kualitatif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data-data yang ada, misalnya mengenai situasi, keadaan, kegiatan pandangan dan sikap yang tampak. ( Surakhmad, 1990 : 23 ).

Penelitian ini akan menggambarkan keadaan dan fenomena yang terjadi tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-Anak Petani Kelapa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya berdasarkan hipotesis yang penulis ajukan, Yaitu Pada Orang Tua Petani Kelapa Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun indikator yang menjadi instrumen dalam penulisan ini adalah :

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-Anak Petani Kelapa	<i>Undang-undang republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang :</i> <i>Sistem pendidikan nasional pasal 34 ayat 1,2,3 dan</i> <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008</i> <i>Pasal 9 Ayat 1,2,3 Dan 4</i>	1,2,3,4,5
	- <i>Undang-undang Pendidikan</i> Ayat (1) Setiap Warga Negara Yang Berusia 6 Tahun Dapat Mengikuti Program Wajib Belajar.	6,7,8,9,10
	- <i>Peraturan Pemerintah</i> Ayat (2) Warga Negara Indonesia Yang Berusia 6 (Enam) Tahun Dapat Mengikuti Program Wajib Belajar Apabila Daya Tampung Satuan Pendidikan Masih Memungkinkan.	11,12,13
	- <i>Undang-undang Pendidikan</i> Ayat (2) Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Menjamin Terselenggaranya Wajib Belajar Minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya.	14,15,16
	- <i>Peraturan Pemerintah</i> Ayat (1) Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Menjamin Terselenggaranya Program Wajib Belajar Minimal Pada	

	<p>Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya</p> <p>- <i>Undang-undang Pendidikan</i></p> <p>Ayat (3) Wajib Belajar Merupakan Tanggung Jawab Negara Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat.</p> <p>- <i>Peraturan Pemerintah</i></p> <p>Ayat (3) Warga Negara Indonesia Yang Berusia Di Atas 15 (Lima Belas) Tahun Dan Belum Lulus Pendidikan Dasar Dapat Menyelesaikan Pendidikannya Sampai Lulus Atas Biaya Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah.</p> <p>- <i>Peraturan pemerintah</i></p> <p>Ayat (4) Warga Negara Indonesia Usia Wajib Belajar Yang Orang Tua/wAlinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Wajib Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.</p>	
--	---	--

**(Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2008 )**

Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dan catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (**Leky J Moleong, 1990 : 190**).

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data – data yang ada, misalnya mengenai situasi, keadaan, kegiatan pandangan dan sikap yang tampak. (Diambil dari Skripsi Haryono, 2006 : 28 dalam Surakhmad, 1990 : 23). yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala-gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian, dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada anak-anak petani kelapa di desa rantau panjang kecamatan enok kabupaten indragiri hilir.

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dipisah dan dikelompokkan baru kemudian dianalisis berdasarkan metode diskriptif kualitatif, dimana data diperoleh disusun dan diberi penjelasan yang diperlukan.

Adapun Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan semua data yang diinginkan
2. Mengkategorisasikan alternative jawaban responden
3. Menentukan besar persentase alternative jawaban, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Dengan Rumus :  $P = \frac{F}{N} \times 100\%$  (Sudjono, 2003 : 40).

Keterangan : P = Besar Persentase Alternative Jawaban  
F = Frekuensi Alternatif Jawaban Responden  
N = Jumlah Sampel Penelitian  
% = Persentase

Hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan, adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebesar 66,67% - 100% = Terlaksana
2. Sebesar 33,34% - 66,66% = Cukup Terlaksana

3. Sebesar 0% - 33,33% = Kurang Terlaksana

(Sutrisno Hadi, 1990 : 229)

### PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Dalam pengkajian dan analisa data dapat dilihat hasil-hasil penelitian dengan cara memasukan kedalam tabel- tabel hasil penelitian yang telah diperoleh. Maka sesuai dengan pengolahan data, penulis tetapkan dengan menggunakan angket. Berkenaan dengan ini maka penulis aka menguraikan data-data yang telah disebar kepada responden. Setelah data dikumpulkan dari jumlah sampel, yaitu 32 responden dari masyarakat Rantau Panjang, maka di peroleh hasil Analisis Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-Anak Petani Kelapa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, untuk lebih jelasnya pada tabel-tabel berikut ini.

#### Identitas Responden.

Usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak, makin tinggi usia seseorang maka seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih dari pada mereka yang berusia muda, sehingga dari kematangan pemikiran dan pengetahuan yang lebih tersebut mampukah mereka menjadi suritauladan didalam kehidupan bermasyarakat, berikut tabel usia responden.

**Tabel 4.6**

Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah
1	25-35 Tahun	15
2	36-47 Tahun	15
3	> 48 Tahun	2
Total		32

*Sumber :Hasil Wawancara*

#### Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir adalah pendidikan yang telah diperoleh saat ini dan belum beranjak kependidikan yang lebih tinggi atau belum menyelesaikan pendidikan yang sedang dijalani. Makin tinggi pendidikan seseorang seharusnya cara berfikir dan melakukan tindakanpun lebih objektif dan mengarah pada hal yang positif, berikut adalah tabel pendidikan terakhir dari responden.

**Tabel 4.7**

Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar	6
2	Sekolah Dasar	18
3	Sekolah Menengah Pertama	8
Total		32

*(Sumber Arsip Desa Rantau Panjang dan data olahan 2012)*

Dari tabel – tabel analisa data diatas, maka dapat disimpulkan dari 32 jumlah responden sebagai perwakilan populasi yang notabeneanya adalah para warga setempat dapat diketahui bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun masih Cukup Terlaksana pada anak-anak petani kelapa.

#### Uji Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan adalah, Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Kurang Terlaksana Pada Anak-anak Petani Kelapa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri hilir.

maka untuk menguji hipotesis diatas dilakukan pengujian hipotesis seperti pada tabel-tabel dibawah ini

**Tabel 4.24**  
Tabel-tabel yang mendukung Hipotesis

No. Tabel	Uraian
4.8	Sosialisasi Pemerintah Tentang Usia Wajib Belajar
4.9	Program Wajib Belajar Bagi Anak-Anak Petani Kelapa Yang Sudah Berusia 6 (Enam) Tahun
4.10	Tanggung jawab orang tua petani kelapa yang memiliki anak usia wajib belajar dengan menyekolahkan anaknya
4.11	Peran Serta Orang Tua Petani Kelapa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Program Wajib Belajar
4.12	Upaya Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Membantu Anak-Anak Petani Kelapa Dalam Memasuki Usia Wajib Belajar
4.13	Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Layanan Dan Kemudahan Serta Menjamin Terselenggaranya Pendidikan Yang Bermutu Bagi Setiap Warganegara Tanpa Diskriminasi
4.14	Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Menjamin Tersedianya Dana Guna Terselenggaranya Pendidikan Terutama Pada Jenjang Pendidikan Dasar
4.15	Penyelenggaraan Yang Baik Pada Satuan Pendidikan/Sekolah Dalam Menjaga Keberlangsungan Program Wajib Belajar Yang Bermutu Yang Memenuhi Standar Nasional
4.16	Evaluasi Dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pada Anak Anak Petani Kelapa
4.17	Program wajib Belajar Minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya
4.18	Sosialisasi Pemerintah Bahwa Anak Usia Diatas 15 Tahun Yang Belum Lulus Sekolah dasar Untuk Menyelesaikan Pendidikanya Sampai Lulus Atas Biaya Pemerintah
4.19	Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak Anak Petani Kelapa Yang Sudah Berusia Diatas 15 Tahun
4.20	Program Paket A Dan B Pemerintah Dalam Upaya Membantu Anak-Anak Petani Kelapa Usia Diatas 15 Tahun Yang Belum Menamatkan Sekolah Dasar Agar Dapat Menyelesaikan Wajib Belajar
4.21	Pasal 31 Uud 45 Tentang Pendidikan Yang Menerangkan Bahwa Setiap Warganegara Yang Memasuki Usia Wajib Belajar Berhak Mendapatkan Pendidikan Dan Pemerintah Wajib Membiayainya
4.22	Bantuan Biaya Pendidikan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Anak-Anak Petani Kelapa Usia Wajib Belajar Yang Orang Tuanya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan
4.23	Penyaluran Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Dan Tepat Sasaran

*Sumber : Data Olahan*

Dari tabel 4.24 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah tabel dari angket yang disebarkan penulis kepada responden yang mendukung hipotesis adalah berjumlah 16 pertanyaan atau setelah dianalisis, yaitu berjumlah 16 tabel.

Untuk mengetahui presentase dari setiap tabel yang mendukung hipotesis, maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.25**

Tabel-tabel yang mendukung Hipotesis dan Presentase Jumlah Jawaban Responden

No. Tabel	Jumlah Responden						Jumlah	
	A ( % )		B ( % )		C ( % )		N	%
	F	Terlaksana	F	Cukup Terlaksana	F	Kurang Terlaksana		
4.8	10	31,2	20	62,5	2	6,3	32	100
4.9	20	62,5	9	28,1	3	9,4	32	100
4.10	10	31,2	18	56,2	4	12,5	32	100
4.11	9	28,1	19	59,4	4	12,5	32	100
4.12	20	62,5	10	31,2	2	6,3	32	100
4.13	9	28,1	20	62,5	3	9,4	32	100
4.14	8	25	22	68,7	2	6,3	32	100
4.15	20	62,5	9	28,1	3	9,4	32	100
4.16	7	21,8	23	71,8	2	6,3	32	100
4.17	10	31,2	20	62,5	2	6,3	32	100
4.18	18	56,3	10	31,2	4	12,5	32	100
4.19	7	21,8	23	71,8	2	6,3	32	100
4.20	10	31,2	17	53,1	5	15,6	32	100
4.21	6	18,7	24	75	2	6,3	32	100
4.22	11	34,3	18	56,2	3	9,4	32	100
4.23	9	28,1	20	62,5	3	9,4	32	100

Sumber : Data Olahan

Dari table 4.25 diatas,dapat diketahui berapa jumlah tabel yang mendukung hipotesis dan persentase jumlah jawaban responden.

Oleh sebab itu untuk melihat tabel mana yang termasuk Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-anak Petani Kelapa Yang Menyatakan Terlaksana,Cukup Terlaksana dan Kurang Terlaksana,maka dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 4.26**

Tabel – tabel yang menyatakan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada anak-anak petani kelapa

No Tabel	Jawaban Responden	Peleksanaan wajib belajar 9 tahun	Jawaban Responden	Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun	Jawaban Responden	Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun
	A	Terlaksana	B	Cukup Terlaksana	C	Kurang Terlaksana
4.8	31,2	-	62,5	Cukup Terlaksana	6,3	-
4.9	62,5	Terlaksana	28,1	-	9,4	-
4.10	31,2	-	56,2	Cukup Terlaksana	12,5	-
4.11	28,1	-	59,5	Cukup Terlaksana	12,5	-



Tabel yang mendukung Hipo Tesis	Tabel yang menya takan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun		Tabel yang mendukung Hipo Tesis	Tabel yang menya takan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun		Tabel yang mendukung Hipo tesis	Tabel yang menya takan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun	
16	4	25	16	12	75	16	0	0

Sumber : Data olahan

Dari tabel 4.28 diatas dapt disimpulkan bahwa :

1. Dari 16 tabel yang mendukung hipotesis, 4 tabel yang menyatakan Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Terlaksana yaitu 25 %
2. Dari 16 tabel yang mendukung hipotesis, 12 tabel yang menyatakan Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Cukup Terlaksana yaitu 75 %
3. Dari 16 tabel yang mendukung hipotesis, tidak ada yang menyatakan Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Kurang Terlaksana , yaitu 0 %

Dari hasil pengujian Hipotesis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Hipotesis dalam penelitian ini adalah ditolak atau tidak terbukti karena pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sudah Terlaksana yaitu sebanyak 75%, Menurut pendapat Sutrisno Hadi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-anak Petani Kelapa dikatakan Terlaksana apabila berkisar antara 66,67% - 100%., Cukup Terlaksana 33,34% - 66,66% dan Kurang Terlaksana 0% - 33,33%. Walaupun dilihat dari hasil angket dan wawancara pada tabel hipotesis diatas, responden yang menjawab Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada anak-anak petani kelapa cukup terlaksana yaitu sebanyak 12 tabel atau 75 % dan yang lainnya mengatakan terlaksana sebanyak 4 tabel atau 25 %. Namun sesuai dengan Tolak Ukur yang ada bahwasanya Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-anak Petani Kelapa termasuk dalam kategori Terlaksana karena menurut pendapat Sutrisno Hadi 75 % tersebut berkisar antara 66,67 – 100 % termasuk kategori Terlaksana.

Oleh Karena itu peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Sudah Terlaksana Pada Anak-anak Petani Kelapa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dari hasil penilititan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-anak Petani Kelapa Sudah Terlaksana yaitu sebanyak 75% menurut pendapat Sutrisno Hadi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-anak Petani Kelapa dikatakan Terlaksana apabila berkisar antara 66,67% - 100%., Cukup Terlaksana 33,34% - 66,66% dan Kurang Terlaksana 0% - 33,33%. Walaupun dilihat dari hasil angket dan tabel hipotesis diatas, responden yang menjawab Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada anak-anak petani kelapa cukup terlaksana yaitu sebanyak 12 tabel atau 75 % dan yang lainnya mengatakan terlaksana sebanyak 4 tabel atau 25 %. Namun sesuai dengan Tolak Ukur yang ada bahwasanya Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Anak-anak petani Kelapa termasuk dalam kategori Terlaksana karena menurut pendapat Sutrisno Hadi 75 % tersebut berkisar antara 66,67 – 100 % termasuk kategori terlaksana.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Sudah Terlaksana Pada Anak-anak Petani Kelapa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sehingga dari teori yang dikemukakan oleh Soelaiman Joesef yang mana sekolah sebagai "Station In Life" , sebab jika seseorang putus sekolah disitu sudah menunggu nasibnya,namun keadaan tersebut sudah banyak ditinggalkan orang karena menurut mereka

khususnya masyarakat petani bahwa belajar disekolah bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan corak kehidupan seseorang, (Soelaiman Joesef , 1979 :16) sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa, Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Kurang Terlaksana Pada Anak-anak Petani Kelapa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Ditolak.

## **2 . Saran – Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, maka penulis menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Orang tua seharusnya sadar betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan anak nantinya seminimal mungkin menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMP
2. Dengan adanya program bantuan pendidikan dari pemerintah hingga tingkat SMP, orang tua yang berekonomi lemah seharusnya sudah tidak perlu lagi merasa takut untuk menyekolahkan anaknya dengan alasan beban biaya karena pemerintah telah berupaya terus memberikan bantuan dana untuk pendidikan
3. Seharusnya Pemerintah terus berupaya mensosialisasikan ke masyarakat dan memfollow - up tentang perkembangan program wajib belajar 9 tahun
4. Diharapkan dengan adanya program beasiswa untuk anak berprestasi dan kurang mampu dari pemerintah akan membantu menumbuhkan semangat anak dalam dunia pendidikan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan baik itu saran maupun masukan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah diberikan berupa saran dan kritikan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT :

1. Bapak Dr. H.M. Nur Mustafa , M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Riau.
2. Ibu Sri Erlinda, SIP, M.Si selaku Ketua Jurusan PIPS FKIP UNRI
3. Bapak Drs. Zahirman . MH selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. dan Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ahmad Eddison, M. Si selaku Pembimbing Akademis dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Hambali M.Si selaku ketua Labor Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau
6. Bapak Ibu Dosen Program Studi PPKn yang telah mengajarkan segudang ilmu kepada penulis.
7. Teristimewa buat kedua orang tua Ayahanda Iskandar dan Ibunda Fadmawati yang tercinta yang tak kenal lelah untuk mencarikan nafkah dengan sebuah harapan anaknya bisa jadi Sarjana.
8. Buat keluarga besar, terimakasih atas doa dan dorongan semangat dalam segala bentuk baik moril maupun materil kepada penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, Abu. Dan Uhbiyati, Nur. Ilmu Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.  
 Gimin. Dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa ( Skripsi, Makalah, dan Artikel ). Jakarta : Rineka Cipta, 2002.  
 Suparyo, Yossi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ( SISDIKNAS ) No.20  
*Wajib Belajar 9 Tahun*, Wikipidia,2008[Online]http://id.wikipedia.org/wiki

Diakses pada tanggal 24 oktober 2012 . 14:00  
*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun ,Wikipedia 2008,*  
[Online]<http://id.wikipedia.org/wiki>  
Diakses pada tanggal 24 Oktober 2012 :14:00  
*Undang-Undang Dasar 1945. Wikipedia,2008*[Online]<http://id.wikipedia.org/wiki>  
Diakses pada tanggal 24 Oktober 2012.14:00  
Sutikno, Sobry. M.Menuju Pendidikan Bermutu. Mataram : NTP Press,2004  
Scoot, James. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta : LP3ES. 1994